

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1989 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN
ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan
Nomor: 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Azis Saputra

NIM. 05040121135



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azis Saputra
NIM : 05040121135
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Penggabungan Gugatan Perkara Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Azis Saputra
NIM. 05040121135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azis Saputra
NIM. : 05040121135
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Penyelesaian Penggabungan
Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang
Tua Terhadap Anak dan Hak Asuh Anak (Studi
Putusan Nomor:938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azis Saputra

NIM : 05040121135

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

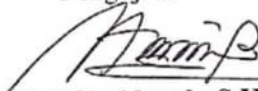
Penguji I



Dr. Suvikno, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

Penguji II



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP. 197409102005012001

Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 6 Maret 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. Sugiyah Mustafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Azis Saputra
NIM : 05040121135
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : azizmuhammad876@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PENGGABUNGAN GUGATAN PERKARA

PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA DAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan
Nomor:938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2025

Penulis

(Muhammad Azis Saputra)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penulis mengambil skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)”. Skripsi ini menjawab dari rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perkara Penggabungan Gugatan perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua dan Hak Asuh Anak?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan data secara akurat mengenai manusia, kondisi, atau fenomena tertentu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berlandaskan pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, serta artikel yang relevan dengan judul skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, serta mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas anaknya. Berdasarkan putusan tersebut jika dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka putusan majelis hakim Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak. Hukum Islam menekankan kemaslahatan anak dengan memastikan mereka mendapatkan pengasuhan yang layak, sedangkan hukum positif mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan. Putusan ini mencerminkan upaya menjaga hak anak dari pengabaian dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip keadilan.

Penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diharapkan dapat menegakkan keadilan dan memberikan manfaat dalam setiap putusan yang dikeluarkan, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di peradilan. Serta untuk peneliti selanjutnya agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil oleh pengadilan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KEWAJIBAN ORANG TUA, PENGGABUNGAN GUGATAN, DAN SADD AL DZARI'AH.....	23
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam	23
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Positif.....	27
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam.....	29
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif	32
E. Konsep Ideal dalam Putusan	35
F. Penggabungan Gugatan.....	37
G. Sadd Al Dzari'ah.....	42

BAB III PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR. 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....	50
A. Sekilas Mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	50
B. Deskripsi Isi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....	51
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	57
D. Putusan Majelis Hakim	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PENGgabungan GUGATAN PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA DAN HAK ASUH ANAK ..	61
A. Analisis Hukum Islam Tentang Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua terhadap anak dan Hak Asuh Anak	61
B. Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua terhadap anak dan Hak Asuh anak	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
A. Kartu Tanda Mahasiswa.....	82
B. Surat Keterangan.....	83
C. Kartu Rencana Studi	84
D. Transkrip Nilai.....	85
E. Kartu Bimbingan Skripsi	86
F. Pengesahan Judul Skripsi.....	87
G. Pengesahan Proposal	88
H. Turnitin dibawah 20%.....	89
I. Biodata Penulis	90

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah bin Mahanna, Ibrahim bin Mahna bin. Sadd Dzara'i 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Riyadh: Dar Fadhilah, 2004.
- Abu Abdullah al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. Al-Jami' Ash-Shahih al - Mukhtasar. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Adam, Panji. "Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah." Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis 7 (January 2021): 17–35.
- Adiah, Halimatus, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." Jurnal Cerdas Hukum 1, no. 1 (2022): 89–99.
- Aji, Dian Utoro. "Kasus Ayah Perkosa Anak Tiri Di Pati, Polisi: Bukan Sejak SD." detikJateng. Pati, Jawa Tengah, Agustus 2024. Accessed March 4, 2025. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7474742/kasus-ayah-perkosa-anak-tiri-di-pati-polisi-bukan-sejak-sd>.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah (2020): 68–86.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 5, no. 2 (2017).
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Revisi 2010., n.d.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Jakarta, 2000.
- Dzajuli, Ahmad. Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak 1, no. 1 (2019)..
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hariadi, Hariadi, and Any Suryani Hamzah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua Dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." Private Law 1, no. 2 (2021): 90–98.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartanto, Dwi, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 236–249.
- Hasyim, Yuni Safira H., and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54–70.
- Himah, Kasyifatul. "Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Antara Perkara Perceraian Dan Hak Hadhanah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Depok Pada Tahun 2017-2021).. theis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *A'lam al-Muqii'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018..
- Kamil, Insan. "Sejarah Hukum Islam." In *Studi Hukum Islam*, 22. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- al-Gharnathi al Maliki (asy-Syatibi), Ibrahim bin Musa al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Fiqh*. Juz 3. Beirut: Dara i-Ma'rifah, n.d.
- Manan, Abdul. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Monita, Rizka Titi. "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2008.

- Muhammad Ismail al-Bukhori, Abu Abdullah bin. Sahih Al-Bukhari. Beirut: Dar as-sa'bu, n.d.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia. Jakarta: Dajmbatan, 2005.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al Dzari'ah Dan Pengapliasiannya Pada Permasalahan Kontemporer." Jurnal Ijtihad (2018): 66–67.
- Nasir, Muhammad. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Dajmbatan, 2005.
- Saputra, Tommy. "Ayah Di Lampung Tega Perkosa Putri Kandungnya Hingga Hamil, Pelaku Ditangkap." detikSumbagsel. Lampung, Desember 2024. Accessed March 4, 2025. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7667469/ayah-di-lampung-tega-perkosa-putri-kandungnya-hingga-hamil-pelaku-ditangkap>.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Soeprmono, R. Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi. Bandung: Bandar Maju, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Syarifudin, Taufiq. "Bocah Di Jaktim Diduga Diperkosa Ayah Sempat Jatuh Sakit Sebelum Meninggal." detikNews. Jakarta Timur, Desember 2024. Accessed March 4, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7674526/bocah-di-jaktim-diduga-diperkosa-ayah-sempat-jatuh-sakit-sebelum-meninggal>.
- Tarigan, Efina Natalia. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Tenri Awaru, A. Octamaya. "Sosiologi Keluarga." Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami. Bandung: PT Al Ma'arif, 1986.
- Zuhayli, Wahbah. Al Wajiz Fi Ushulil Fiqh. Damaskus: Dar al-fkr, 1999.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama. Malang: Setara Press, 2016.

Al-Qur'an, Al-An'am:108.

Al-Qur'an, al-Baqarah: 233.

Al-Qur'an, Al-Baqarah:104.

Al-Qur'an, an-Nisa': 19.

Al-Qur'an, At-Tahrim: 6.

Haroen, Ushul Fiqh I, 161.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 78.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 83.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 84.

Laporan Akademik Praktikum Peradilan Agama Kabupaten Kediri, 2024.

Pasal 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

Salinan Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf c.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 48.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat (5) Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 Ayat (1) Tentang Peradilan Agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A